

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bentuk reformasi birokrasi dilembaga pemerintahan dari tahun ketahun dituntut untuk mampu mengikuti arus perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Peningkatan pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah karena Pelayanan publik seringkali menjadi ukuran paling mudah dipahami sejauh mana kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya. Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi penting bagi pemerintah untuk melakukan regulasi, proteksi dan distribusi pelayanan administrasi serta informasi terhadap masyarakat.

Undang-Undang No. 25 Tahun (2009) mendefinisikan pelayanan publik sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” .

Pelayanan publik merupakan proses pemenuhan kebutuhan dengan sebaik-baiknya guna memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani. Agar pelayanan publik yang diberikan tersebut sesuai dengan tujuan, maka perlu didukung oleh kemampuan aparat birokrasi yang handal dan profesional. Namun keahlian yang baik perlu juga di tunjang dengan mental dan kemauan yang kuat dalam memberikan pelayanan yang baik.(Masrin, 2013). Salah satu bentuk pelayanan publik yang terus ditingkatkan dan menjadi fokus utama Pemerintah

Nasional yaitu tentang pemerataan administrasi kependudukan dengan diterapkannya program E-KTP.

Menurut Undang –Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembaharuan dalam bidang administrasi kependudukan dari kartu tanda penduduk konvensional ke elektronik dimulai pemerintah pada bulan febuari 2011 melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Program Elektronik –KTP atau dimasyarakat lebih populer dengan sebutan E-KTP bentuk dari segi fisik maupun penggunaanya berfungsi secara terkomputerisasi. E-KTP didesain dengan metode autentikasi dan pengaman data tinggi yang terhubung dalam satu database Nasional. Program pembuatan E-KTP oleh pemerintah dilatarbelakangi untuk meminimalisir dan mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggandakan identitas dan melakukan tindakan kriminal lainnya.

Pemerintahan daerah tingkat Kecamatan Gadingrejo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Indonesia. Berjarak kira-kira 10 km ke arah timur Kota Pringsewu dan 35 km ke arah barat Kota Bandar Lampung. Wilayah ini terdiri atas 23 pekon dengan luas wilayahnya 85 ,71 km/segi dan jumlah penduduk mencapai 74.650 jiwa dari total 20429 KK. Kecamatan gadingrejo merupakan pemerintah daerah yang menjadi salah satu bagian dalam pelaksanaan program E-KTP, Namun dalam pelaksanaanya memiliki banyak kendala dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, karna sebagian besar pelayanan masih

menggunakan sistem manual. serta akses pemberian informasi terhadap masyarakat masih sangat minim sehingga berdampak dengan pelayanan publik Antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan tidak berjalan dengan maksimal.. Sebagai permasalahan yang banyak ditemui dipemerintah kecamatan gadingrejo yaitu dimana ketika warga ingin membuat E-ktp warga yang datang tanpa membawa persyaratan dan surat undangan/ rekomendasi perekaman dari kelurahan diharuskan untuk mengurus terlebih dahulu sehingga warga direpotkan untuk bolak balik kelurahan ke kecamatan untuk bisa melakukan perekaman e-ktp . Kemudian kurangnya komunikasi dengan masyarakat menyebabkan jadwal perekaman e- KTP harus dilalui dengan proses antrian sehingga menyita waktu masyarakat yang sebagian besar bekerja, permasalahan rentan waktu penerbitan E-KTP yang cukup lama dan tanpa adanya konfirmasi kepastian kepada masyarakat membuat alasan masyarakat kurang antusiasme dalam mengurus E-KTP. Pelayanan semacam ini lah yang kemudian menjadi permasalahan yang harus di cari solusinya agar pemerintah dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan demikian Kecamatan Gadingrejo membutuhkan suatu *web* untuk layanan media informasi pendaftaran E-KTP secara online. Dengan adanya *website Pendaftaran* maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengurus administrasi kependudukan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, hal ini mendasari peneliti untuk mengajukan Rancangan sebuah sistem informasi yang berjudul “ *Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran E-KTP berbasis web* “ Dengan

dibangunnya sistem informasi pendaftaran berbasis *website* yang dapat diakses dengan cara online, hal ini diharapkan dapat memberikan sebuah solusi kepada masyarakat untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diangkat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi pendaftaran Kartu Tanda Penduduk *Electronic* (E-KTP) berbasis web, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan E-KTP?
2. Bagaimana cara menguji kelayakan sistem informasi pendaftaran E-KTP berbasis web dengan Study kasus kecamatan Gadingrejo?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dikecamatan gadingrejo, dalam penyusunan penelitian ini penulis memberikan batasan penelitian yaitu :

1. Sistem ini dirancang hanya sebatas untuk pendaftaran, penjadwalan perekaman dan pemberitahuan status pengambilan E-KTP.
2. Analisis dan perancangan sistem informasi pendaftaran E-KTP tidak membahas mengenai sistem keamanan komputer tingkat lanjut dan jaringan yang terdapat dalam sistem E-KTP .
- 3 Sistem yang dibangun tidak menghubungkan dengan sistem pendataan penduduk yang sudah ada dipemerintah.

4. Sistem ini akan berakhir pada tahapan proses cetak dari hasil registrasi pendaftaran E-KTP yang dilakukan oleh masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi sistem pendaftaran Kartu Tanda Peduduk *Electronic* (E-KTP) berbasis web di kecamatan Gadingrejo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memudahkan masyarakat dalam permohonan pembuatan E-KTP.
2. Dengan adanya sistem pendaftaran dan penjadwalan perekaman dan pengambilan e-ktip dapat dikelompokkan sesuai dengan satu kelurahan.
3. Mengefisiensi waktu dan menghemat biaya yang masyarakat keluarkan Karena tidak lagi harus mengantri dan bolak-balik ke kantor kecamatan.
4. Mempermudah dan mempercepat pemerintah dalam proses pendataan data kependudukan.
5. Dapat memberikan informasi selisih data kependudukan dari database dengan data dilapangan secara otomatis.